



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung (Ali, 2018). Selain itu, pariwisata juga memiliki kontribusi untuk memerangi ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi (Giampiccoli, 2020). Salah satu aspek pariwisata yang dapat mewujudkan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan adalah melalui pengembangan ekowisata (Sumarmi et al., 2021b). Bahkan pengembangan ekowisata dapat berkontribusi pada konservasi ekosistem dan meningkatkan nilai ekonomi terutama melalui kegiatan pariwisata (Abidin et al., 2021; Noriega et al., 2020).

Dalam pembangunan ekowisata ini, penduduk lokal merupakan stakeholder utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Lundberg, 2017). Kebijakan pembangunan pariwisata di daerah sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan masyarakat dan pembangunan lingkungan secara beriringan dan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata dan lingkungan berkelanjutan membutuhkan komunikasi dari banyak stakeholder, tidak hanya ditujukan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif, tetapi juga kepada pengunjung, untuk liputan media dan diskusi di media sosial (Yasir, Nurjanah, et al., 2021). Dengan kata lain kegiatan pengembangan pariwisata menjadi media yang efektif untuk memberikan kesadaran lingkungan.

Terkait dengan ini, komunikasi kepariwisataan harus melibatkan masyarakat sebagai unsur utama sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu. Hal ini sejalan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata merupakan upaya untuk mendorong para pelaku di sektor pariwisata untuk memiliki kesadaran dan saling mendukung, karena kesadaran warga terhadap pembangunan pariwisata sangat penting (Lundberg, 2017). Penduduk lokal sebagai pemangku kepentingan sangat penting dilibatkan karena



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pengembangan pariwisata harus berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif pada penduduk lokal (Muzapu & Sibanda, 2016).

Ekosistem di lingkungan sekitar laut dan pesisir pantai telah memberi masyarakat banyak penghidupan atau manfaat, dari kegiatan ekonomi, rekreasi, dan manfaat sosial budaya. Di satu sisi kawasan laut dan pesisir ini mampu mendukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun di sisi lain peningkatan ekonomi berbasis ekosistem laut ini berdampak negatif pada kualitas lingkungan pesisir yang semakin memburuk (Eales et al., 2021). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan basah adalah lingkungan yang paling produktif di dunia dan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pentingnya dan manfaat lahan basah termasuk pasokan air tawar, makanan dan bahan bangunan, keanekaragaman hayati yang kaya, penyimpanan karbon, pengendalian banjir, pengisian air tanah, dan mitigasi perubahan iklim (Chen & Shih, 2019). Penelitian sebelumnya tidak hanya membuktikan nilai lahan basah bagi manusia tetapi juga mengkaji beberapa flora dan fauna yang terancam dan terancam punah, dan contoh reptil, amfibi, ikan, dan burung yang terancam punah yang bergantung pada lahan basah.

Sebagian besar abrasi di Bengkalis disebabkan oleh tingginya gelombang pasang, naiknya permukaan air laut, dan eksploitasi mangrove secara intensif untuk bahan bangunan, arang kayu, dan kayu bakar. Deforestasi mangrove juga terjadi karena pembukaan lahan untuk budidaya udang (Yasir et al., 2020b). Hutan mangrove jelas merupakan salah satu jenis ekosistem lahan basah yang penting karena memberikan banyak manfaat kepada kehidupan makhluk manusia dan ekosistem lingkungan laut. Pengembangan ekowisata akan berkontribusi pada konservasi ekosistem (Abidin et al., 2021). Oleh karena itu, peneliti merasa perlu adanya kajian komunikasi lingkungan untuk memitigasi abrasi dan mengkonservasi mangrove berbasis komunitas di Kabupaten Bengkalis. Tingginya eksploitasi hutan mangrove dan rendahnya penegakan hukum bagi penebang hutan membuat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis semakin meluas (Astuti & Widodo, 2018). Beberapa kelompok masyarakat terutama nelayan di Bengkalis telah melakukan konservasi hutan mangrove



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

baik yang dibina oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis maupun yang dibina oleh CSR Perusahaan Pertamina.

Konservasi hutan mangrove melibatkan masyarakat dengan menjadikan mangrove sebagai objek atau destinasi wisata. Desa yang terdapat konservasi hutan mangrove untuk ekowisata di antaranya ada di Desa Sebauk, Teluk Pambang, Deluk, Penebal, dan lain-lain. Desa Sebauk misalnya memiliki Kelompok Masyarakat Peduli Alam Sekitar (Kempas) dan desa Penebal memiliki kelompok Kedabu. Pembinaan kelompok Nelayan seperti Kempas menjadi contoh dan salah satu solusi terhadap persoalan yang terjadi pada hutan mangrove di daerah pesisir Kabupaten Bengkalis (Yasir et al., 2020a). Namun sayang keberadaan kelompok ini tidak dibina secara berkelanjutan, sehingga banyak objek dan fasilitas ekowisata yang sudah dibangun menjadi terbengkalai.

Ekowisata didefinisikan sebagai pengembangan pariwisata strategi menerapkan prinsip ekowisata perlindungan lingkungan dari dampak negatif (Abidin et al., 2021). Ekowisata merupakan wisata berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis (Karta & Suarthana, 2014). Komunikasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting, karena usaha ekowisata membutuhkan peran aktif komunitas. Manajemen pengelolaan lingkungan berbasis komunitas adalah strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pengambilan keputusan atas sumber daya dan lingkungan yang berkelanjutan berada pada organisasi dalam komunitas di daerah tersebut (Sumarmi et al., 2021b).

Fungsi ekologi mangrove adalah untuk menjaga, pelindung dan menstabilkan garis pantai dari abrasi, gelombang dan air pasang. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai kelangsungan hidup habitat yaitu berkembang biak, tempat asuh dan mencari makanan berbagai jenis ikan, burung dan jenis primata. Sementara fungsi sosial ekonomi mangrove adalah sumber mata pencaharian, sumber bahan bangunan, wisata alam, areal pertambakan dan lain-lain (Rusdianti & Sunito, 2012).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hamparan wilayah mangrove besar dan luas yang ada di pesisir Provinsi Riau harusnya menjadi anugerah. Selain menjadi pelindung pantai, konservasi hutan mangrove dapat dilakukan dengan menjadikan objek wisata. Sistem pengembangan ekowisata sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah (Pemerintah, 2009). Keanekaragaman hayati dalam Ekowisata mangrove sebagai bagian pelestarian hutan gambut telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut. Pengelolaan wisata mangrove tidak hanya sebagai sarana wisata namun dijadikan sebagai sarana edukasi akan kekayaan tumbuhan-tumbuhan mangrove.

Dalam kajian ini, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengembangkan model komunikasi lingkungan dan pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism*) dalam mengatasi abrasi. Keberadaan ekowisata mangrove di desa-desa pinggiran pantai Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan masyarakat lokal tidak saja bernilai ekonomis tapi bernilai edukasi ekologis. Sebagaimana dijelaskan bahwa ekowisata merupakan wisata berbasis alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis (Karta & Suarhana, 2014).

Pemerintah dan kolaborasinya bersama perusahaan memiliki kontribusi dalam menyebarluarkan serta menata ekowisata mangrove bersama-sama dengan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menempatkan masalah ini sebagai masalah utama. Pemerintah mengharapkan kawasan pantai Bengkalis yang rusak bisa diperbaiki dan direhabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi, sehingga mampu mendukung ekowisata daerah dan mendukung ekonomi masyarakat (KemenLHK, 2021).

Komunikasi dengan memperhatikan aspek lingkungan untuk memberdayakan masyarakat tempatan ini tentu harus didukung oleh semua *stakeholder*. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam bidang pariwisata, dibutuhkan upaya untuk menyusun kebijakan pembangunan pariwisata dan perencanaan komunikasi pariwisata yang komprehensif. Strategi pembangunan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

parwisata semestinya tidak berorientasi pada pendekatan ekonomi belaka namun diarahkan ke pendekatan lingkungan, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan ini diukur dengan kemampuan menggali potensi keunikan, kearifan, nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat lokal. Hal ini sejalan bahwa komunikasi lingkungan berupaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merespon dengan tepat sinyal lingkungan yang relevan dengan kesejahteraan peradaban manusia dan sistem biologis alami (Cox, 2010).

Model komunikasi lingkungan dan pariwisata yang terintegrasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pelaku usaha lainnya setidaknya dapat mengatasi permasalahan kerusakan hutan bakau dan abrasi di pantai Kabupaten Bengkalis. Pengembangan pariwisata berbasis pelestarian lingkungan alam dalam upaya pembangunan masyarakat dan wisata yang berkelanjutan menjadi penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat secara maksimal. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk memahami model komunikasi pengembangan ekowisata mangrove dalam mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis. Selain itu penelitian ini juga mengambil perspektif komunikasi lingkungan yang tidak saja dipandang sebagai instrumen atau alat pendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dari pengelolaan lingkungan itu sendiri (Flor & Cangara, 2018). Oleh karena itu, tanpa komunikasi maka pengelolaan lingkungan akan menghadapi banyak masalah yang krusial. Komunikasi selain harus mampu membangkitkan partisipasi masyarakat, ia juga harus mampu memberdayakan anggota masyarakat untuk tidak tinggal diam sebagai penerima yang pasif, tetapi juga bisa menjadi sumber informasi yang aktif. Kajian komunikasi pariwisata mencakup perumusan tujuan komunikasi, menganalisis khalayak dan sumber daya komunikasi yang tersedia dan menetapkan cara implementasinya (Jurin et al., 2010). Dalam hal ini, komunikasi lingkungan dan pariwisata yang terintegrasi antara lembaga pemerintah, perusahaan dan masyarakat lokal menjadi hal yang sangat krusial dalam pelestarian dan pengembangan ekowisata mangrove.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Kondisi hutan mangrove di Pesisir Kabupaten Bengkalis banyak mengalami kerusakan akibat abrasi ataupun penebangan liar sehingga menjadi masalah utama daerah ini. Hutan mangrove di sebagian wilayah mengalami kerusakan karena dijadikan tambak udang, dijadikan bahan baku arang dan sebagai bahan bangunan, sehingga membuat kerusakan pada ekosistem yang lain semakin mengkhawatirkan. Pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Bengkalis masih kurang memperhatikan aspek kekayaan dan pelestarian alam terutama lahan mangrove yang memiliki potensi yang besar. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai sumber daya utama dalam mengembangkan wisata belum memiliki kesepahaman atau saling pengertian tentang keberadaan hutan mangrove. Komunikasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan pengembangan lingkungan belum menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekowisata mangrove. Oleh karena itu, berangkat dari hal ini identifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi abrasi berbasis pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove untuk mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata mangrove untuk mengatasi abrasi dan kerusakan mangrove di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi abrasi berbasis pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

2. Untuk menganalisis komunikasi lingkungan dalam mengembangkan ekowisata mangrove untuk mengatasi abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekowisata mangrove untuk mengatasi abrasi dan kerusakan mangrove di Kabupaten Bengkalis.

1.4 Luaran/Manfaat Penelitian

Luaran penelitian ini adalah berbentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional “*Environmental & Socio-Economic Studies*” yang terindeks Scopus Q2 dan prosiding internasional terindeks Scopus. Luaran penelitian juga dapat menjadi bahan ajar untuk mata kuliah Komunikasi Lingkungan dan Manajemen Komunikasi. Kajian ini diharap menjadi buku referensi yang membahas terkait Manajemen Komunikasi Berbasis Pengembangan Ekowisata. Selain itu, penelitian ini secara tidak langsung bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya terkait dengan teori atau model komunikasi lingkungan dan komunikasi pariwisata yang tepat. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada pihak pemerintah dalam pengambilan kebijakan komunikasi baik yang bersifat strategis maupun kebijakan taktis.